

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Aziz Syamsudin, *Hukum Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.

Elwi Danil, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cet ke-2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Fadilah Sabri, *Disertasi : Pertanggungjawaban pidana Dokter yang melakukan malapraktek dalam memberikan pelayanan kesehatan*, Padang, 2017.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Press Group, Jakarta Selatan, 2013.



Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yudhi Setiawan, Dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

Edita Elda, *Kajian Penerapan Pidana Mati Atas Keadaan Tertentu dalam Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Padang : Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI, Vol. XI No.3/ Januari s/d Juni 2013.

T. Gayus Lumbuun, *Mekanisme Penindakan terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2-Juni 2011.



Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Criminal Policy*,
Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2-Juni 2011.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor
26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan*
Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang *pengadaan tanah bagi*
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang *pengadaan tanah bagi*
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembayaran dalam*
Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen
Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
2006 Tentang *Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan*
dan Belanja Negara Dilingkungan Depertemen Agama.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

E. Website

Defenisi, pengertian yuridis yang, diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> pada tanggal 21 Juli 2018.

Informasi Media, Pengertian Analisis yang di akses dari <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 21 Juli 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi, pada tanggal 21 Juli 2018.

